



UNES

Journal of Social and Economics Research

Volume 2, Issue 1, June 2017

P-ISSN 2528-6218

E-ISSN 2528-6838

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR SEKRETARIS DEWAN KOTA PADANG

THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND HUMAN RESOURCES TO QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS IN SECRETARY OFFICE OF THE COUNTRY OF PADANG COUNCIL

Devi Edriani

Fakultas Ekonomi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Email: devi_edriani@upiyptk.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Standar, akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, kualitas laporan, keuangan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Populasi dari penelitian ini adalah semua pegawai pada kantor sekretaris dewan kota Padang. Sumber datanya yaitu data primer dan data skunder, data primer yaitu berupa angket yang dijalankan terhadap responden sedangkan data sekunder yaitu hasil laporan keuangan beberapa tahun terakhir. Uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, Uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3) Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Copyright © 2017 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

government accounting, standar, human resources, quality of financial statement

ABSTRACT

This study aims to analyze and see the effect of the application of government accounting standards and human resources to the quality of financial statements at the secretary office of Padang city council. The type of this research is descriptive and associative research. The population of this study were all employees at the secretary office of Padang city council. Sources of data are primary data and secondary data, primary data is in the form of questionnaires that are executed against respondents while secondary data is the result of financial statements of recent years. Test the instrument using validity test and reliability test. Data analysis used descriptive analysis and inductive analysis, normality test, heterokedasticity test and multicollinearity test and hypothesis test using multiple regression analysis, F test and t test. The result of the research shows that: 1) The implementation of government accounting standard has a significant effect on the quality of financial report, 2) The human resources have significant effect to the quality of financial report, 3) The application of government accounting standard and human resources together significantly influence the quality of financial report.

Copyright © 2017 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan publik yang baik telah mendorong pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, akan tetapi selain mempunyai kewenangan pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut.

Menurut PP No 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam PP No 8 Tahun 2006, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya sangatlah penting. Menurut Sonny Sumarsono (2003, 4), Sumber Daya Manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004) dalam Erma dan Shinta (2014), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).

Kantor sekretaris dewan kota Padang mengelola keuangan sendiri dan membuat laporan keuangan secara berkala dengan berdasarkan kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan pegawai yang bekerja pada kantor sekretaris dewan adalah pegawai yang berkompeten di bidangnya dan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, ada yang tamatan D3, S1 dan S2. Untuk itu penulis tertarik untuk melihat seberapa jauh pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan

sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian ini dilakukan di kantor sekretaris dewan kota Padang. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan sekretaris dewan kota Padang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dengan skala likert. Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas. Teknik analisis data dalam penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya dilakukan uji F dan uji hipotesis dengan uji t dan signifikansi $\alpha=0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Induktif

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data yang dianalisis normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan $\alpha = 0,05$. Jika level signifikan besar dari $\alpha = 0,05$, maka data tersebar secara normal, sedangkan jika level signifikan kecil dari $\alpha = 0,05$ maka data tidak tersebar secara normal (Santoso, 2000:102). Setelah dilakukan analisis data dengan menggunakan program SPSS maka didapat hasil seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y	x1	x2
N		56	56	56
Normal Parameters ^a	Mean	72.50	60.38	57.16
	Std. Deviation	10.157	11.887	11.686
Most Extreme Differences	Absolute	.118	.088	.079
	Positive	.093	.088	.079
	Negative	-.118	-.080	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.880	.662	.591
Asymp. Sig. (2-tailed)		.421	.774	.876

Sumber: Data olahan tahun 2017

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa masing-masing data variabel yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), sumber daya manusia (X2) dan kualitas laporan keuangan (Y) tersebar secara normal. Sebab level

signifikan lebih besar dari $\alpha = 0,05$, dengan demikian dapat dinyatakan semua variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

2) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain (Idris, 2012:87). Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Apabila $\text{Sig} > 0,05$, maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.859	3.786		1.812	.076
x1	.084	.303	.187	.276	.784
x2	-.074	.308	-.162	-.239	.812

Sumber: Data Olahan Tahun 2017

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa $\text{Sig. Y} = 0,076$, $\text{Sig. X}_1 = 0,784$ dan $\text{Sig. X}_2 = 0,812$. Ketiga nilai signifikan variabel lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa semua variabel signifikan atau tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Salah satu syarat dalam penggunaan analisis regresi yaitu tidak ada masalah multikolonearitas atau di antara variable bebas tidak memiliki korelasi yang erat. Menurut Idris (2012:82) untuk mendeteksi ada tidaknya multikoloniearitas dengan bantuan SPSS dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

$\text{VIF} \geq 5$ terdapat masalah multikolinearitas

$\text{VIF} < 5$ tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Berdasarkan analisa data dengan SPSS diperoleh hasil analisis yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.594	2.818		3.049	.004		
x1	.108	.032	.096	3.336	.002	.997	1.003
x2	.935	.028	.978	33.893	.000	.997	1.003

Sumber: Data Olahan Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 5 dan *tolerance* mendekati 1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya atau variabel independen pada penelitian ini bebas multikolinearitas sehingga dapat digunakan analisis regresi berganda.

b. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menganalisis pengaruh 2 (dua) variabel bebas yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) dan sumber daya manusia (X_2) yang mempengaruhi Kualitas laporan keuangan (Y). Berdasarkan analisa data dengan SPSS diperoleh hasil analisis regresi berganda seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	68.179	6.708		10.164	.000
x1	1.586	.536	1.856	2.957	.005
x2	1.600	.546	1.840	2.932	.005

Sumber: Data Olahan Tahun 2017

Dari Tabel 5 di atas dapat dirumuskan model regresi linear berganda dari variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = 68,179 + 1,586 X_1 + 1,600 X_2$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta 68,179 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan Sumber daya manusia (X2) maka Kualitas laporan keuangan adalah sebesar 68,179.

Besar koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) 1,586. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan. Setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 1,586.

Sedangkan untuk variabel sumber daya manusia memiliki koefisien regresi 1,600 yang berarti setiap peningkatan sumber daya manusia sebesar 1 satuan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 1,600. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan, semakin berkualitas sumber daya manusia nya maka semakin baik kualitas laporan keuangannya.

Jadi dari persamaan regresi berganda di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, apabila kedua variabel tersebut naik sebesar satu satuan maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan sebesar $1,586 X_1 + 1,600 X_2$.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berguna untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil olahan data regresi menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.377 ^a	.142	.110	9.584

Sumber : hasil olahan data primer 2017

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,110. Hal ini berarti besar kontribusi antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan Kota Padang adalah 0,110, atau 11%. Sedangkan sisanya sebesar 0,89 atau 89% disumbangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk melihat pengaruh secara parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dilanjutkan dengan uji t.

Pengujian Hipotesis

1) Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Acuan yang digunakan adalah jika nilai $\text{sig.} \leq 0.05$ maka H_0 ditolak. Akan tetapi jika nilai $\text{sig.} > 0.05$, maka H_0 diterima.

a. Hipotesis pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang.

Dari hasil olahan data uji t yang dapat dilihat pada tabel 4 diperoleh nilai t hitung $2,957 > t$ tabel $2,004$ dan Sig sebesar $0,005 < \alpha = 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai Sig $0,005 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang.

b. Hipotesis kedua

Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil olahan uji t pada Tabel 4 diperoleh t hitung $2,932 > t$ tabel $2,004$ dan nilai Sig $0,005 < \alpha = 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima karena t hitung $> t$ tabel atau nilai Sig $= 0,005 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang

2) Uji F

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis ketiga adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang. Untuk membuktikan hipotesis ketiga ini dilakukan uji F.

Tabel 6
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	806.101	2	403.050	4.388	.017 ^a
Residual	4867.899	53	91.847		
Total	5674.000	55			

Sumber: hasil olahan data primer 2017

Berdasarkan Tabel 6 di atas diperoleh F hitung $4,388 > F$ tabel $3,172$ dan nilai Sig $0,017 < 0,05$, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif

(Ha) di terima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Sekretaris Dewan Kota Padang

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang, artinya bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan, begitupun sebaliknya dengan tidak menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik ketika menyusun laporan keuangan maka hasil laporan keuangan yang dibuat tidak memiliki kualitas yang bagus. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005:11) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dari pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darman (2009: 68) yang menyatakan bahwa salah satu kunci baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintahan. Suatu daerah yang menerapkan prinsip standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Sekretaris Dewan Kota Padang.

Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor sekretaris dewan kota Padang, artinya peningkatan sumber daya manusia mampu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah sehingga dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan begitupun sebaliknya dengan rendahnya kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga menjadi kurang baik. Maka dalam mengelola keuangan instansi pemerintah yang baik pegawai pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan-pelatihan dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan. Kesemuanya itu dibutuhkan untuk dapat menerapkan sistem akuntansi pemerintahan yang ada.

Hal ini sejalan dengan pendapat Warisno (2008) dalam Windiastuti (2013) yang menyatakan sumber daya manusia yang kompeten mampu memahami logika akuntansi dengan baik, kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan tidak sesuai laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jadi sudah seharusnya instansi pemerintah menempatkan dan mempekerjakan pegawai yang sesuai dengan bidang keahliannya dan memberikan pelatihan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

3. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan kantor sekretaris dewan kota Padang, artinya semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintahan dan semakin baik kualitas sumber daya manusianya maka laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas begitupun sebaliknya dengan tidak menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dan tidak menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi maka laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi pemerintah menjadi kurang berkualitas dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kalau dalam menyusun semua informasi tersebut diatas tidak didasarkan kepada penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dan tepat serta juga tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah dan membuat laporan keuangan maka tentu semua laporan yang dibuat tidak memiliki kualitas yang baik atau tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pernyataan-pernyataan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dan tepat dalam menyusun laporan keuangan dan menempatkan pegawai yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan menguasai bidang keuangan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Diharapkan pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya dan diharapkan untuk selalu mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai sehingga dapat cepat tanggap terhadap perubahan peraturan perundangan-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra dan Arastyo Andono Fidelis. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 05 Nomor 02: Halaman 18–30.
- Erma Setiawati, Shinta Permata Sari. 2014. *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi*. Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi FEB-UMS.
- Darman, Siska. 2009. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi: BPKP Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNP
- Idris. 2012. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS. Edisi Revisi III*. Padang. Fakultas Ekonomi UNP
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku SPSS*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Media
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi manajemen sumber daya manusia dan ketenagakerjaan*. Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Warisno. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Widiastuti, Ruri. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.